

Model Non-Ideal Reformasi Pasar India dalam Kontrol Ketidaksempurnaan Pasar dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Atika Wardah

ABSTRAK

Secara teoretis reformasi pasar harus dilakukan dengan memenuhi kriteria outcome ideal. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada kasus empiris di India. Kasus di India justru menunjukkan keberhasilan reformasi pasar dalam model non-ideal yang minim liberalisasi dan depolitisasi. Latar belakang model non-ideal tersebut adalah adanya ketidaksempurnaan pasar terutama berupa informasi asimetris serta akses terhadap sumber daya yang tidak merata. Hambatan-hambatan menuju kesejahteraan itu mampu diatasi India dengan intervensi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung ekonomi pasar tanpa merugikan sektor dalam negeri. Misalnya, kebijakan substitusi impor, regulasi moda masuk joint venture, dan kebijakan wajib belajar hingga perguruan tinggi. Indikasi dari keberhasilan tersebut termasuk posisi India sebagai kekuatan ekonomi baru, pertumbuhan produk domestik bruto, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Kata-kata Kunci: reformasi pasar, outcome ideal, gradualisme, kekuatan ekonomi baru

Theoretically, implementation of market reforms is based on four ideal outcomes, but it does not apply to the empirical case in India. The case in India shows the success of market reform is in a non-ideal model that there is minimum level of liberalization and depoliticization. The background of the non-ideal model was market imperfection; mainly asymmetric information and uneven distribution of resources. Those barriers to prosperity were overcome through intervention in the form of policies that support market economy without harming the domestic sector. Indications of this success including India's position as a new economic power, gross domestic product growth, and poverty reduction.

Keywords: market reform, ideal outcomes, gradualism, new economic power

India sebagai negara yang dinilai berhasil melakukan reformasi pasar pada kenyataannya tidak sepenuhnya menerapkan *outcome* ideal dari reformasi tersebut, melainkan mencapai keberhasilan secara gradual melalui kontrol terhadap ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection*). Keberhasilan India dalam melaksanakan reformasi pasar dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama setidaknya dua dekade terakhir (Beausang 2012). Meskipun sempat terjadi krisis, tidak perlu waktu lama bagi India untuk kembali pulih dan menormalkan angka pertumbuhan ekonominya. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang menunjukkan bahwa India berhasil dalam pelaksanaan reformasi pasar seperti peningkatan produktivitas, perbaikan infrastruktur, dan keunggulan di bidang jasa untuk kelas menengah ke atas. Perlu diketahui pula bahwa India melakukan reformasi pasar secara gradual, tidak seperti negara-negara bekas Uni Soviet yang mengalami *shock therapy*. Secara historis dan teoretis, pengalaman India dalam reformasi pasar dan keberhasilannya menjadi kekuatan ekonomi baru akan dibahas dalam tulisan ini.

Teori tentang Reformasi Pasar Ideal dan Kasus-Kasus

Jika ditarik dari literatur-literatur yang sudah ada, dapat dipahami tentang pelaksanaan reformasi pasar yang banyak dilakukan akibat tekanan-tekanan yang didapatkan dari pihak eksternal seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund / IMF) dan Bank Dunia. Pengadopsian reformasi pasar di tingkat domestik disampaikan oleh Henisz et al (2005) merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan internasional berupa koersi, emulasi (perlombaan) normatif, dan mimikri kompetitif. Tekanan-tekanan seperti itu pada akhirnya memengaruhi kemunculan elemen-elemen ideal (*outcome ideal*) yang menjadi bagian dari reformasi pasar yaitu: (1) privatisasi perusahaan milik negara; (2) pemisahan *de jure* antara otoritas regulatori (legislatif) dengan eksekutif; (3) eliminasi *de facto* pengaruh politik dari eksekutif terhadap otoritas regulatori, atau disebut dengan depolitisasi; serta (4) pembukaan dari pasar retail menjadi penyedia jasa yang beragam, atau dapat dikatakan sebagai liberalisasi. Dengan elemen-elemen ideal tersebut, seharusnya reformasi pasar tidak hanya berupa transisi dari ekonomi yang tertutup menjadi terbuka terhadap partisipasi privat. Lebih dari itu, reformasi pasar berarti juga menandai

adanya partisipasi kompetitif (Susanto 2015) yang memudahkan setiap orang—bukan hanya sebagian aktor privat yang besar—untuk terlibat dalam persaingan di pasar.

Sebagai contoh mengenai reformasi pasar yang ideal dan sukses yaitu Tiongkok yang memulai keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi langsung (FDI) di masa pemerintahan Deng Xiaoping. Regulasi yang menjadi dasar keterbukaan tersebut adalah Joint Management Law (Sino-Foreign Mutual Corporate Investment Law), sedangkan Foreign Enterprise Law tahun 1986 menandai berakhirnya restriksi regional atas investasi mandiri perusahaan asing. Dengan dasar-dasar regulatoris tersebut, Tiongkok menarik perusahaan asing untuk menghasilkan modal asing, transfer teknologi, dan promosi ekspor yang salah satunya dilakukan melalui pembangunan zona liberalisasi ekonomi (Motohashi 2015). Zona-zona yang dibangun meliputi empat zona ekonomi—Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen—di tahun 1980 dan empat belas kota pesisir di tahun 1984.

Hingga tahun 1990-an, Tiongkok memang masih belum dianggap benar-benar berhasil melakukan reformasi pasar. Namun, upaya terus digalakkan untuk meliberalisasi perdagangan melalui penurunan hambatan tarif, tawaran buruh murah, juga upaya aksesi keanggotaan World Trade Organization (WTO). Di tahun 2001, barulah Tiongkok resmi menjadi anggota WTO dan semakin melonggarkan restriksi pada kapital asing di industri jasa (Motohashi 2015). Awalnya, pemerintah Tiongkok mengatur dengan ketat FDI yang masuk, termasuk juga menerapkan aturan agar perusahaan asing harus menggunakan moda bisnis *joint venture* dengan perusahaan lokal dalam persentase berbeda-beda antar sektor. Perkembangan yang terjadi selanjutnya justru menunjukkan Tiongkok yang semakin membebaskan perusahaan untuk menerapkan *wholly owned subsidiary* ataupun *joint venture*. Dari reformasi yang telah dilakukan Tiongkok tersebut, United Nations Conference on Trade and Development (2013) mencatat kenaikan signifikan dalam arus investasi masuk dan keluar. Selama periode 1990 hingga 2014, pada beberapa tahun di antaranya Tiongkok bahkan sempat menyaingi Amerika Serikat (AS) dan sepenuhnya mengalahkan Singapura di Asia.

Selain mengenai elemen-elemen apa saja yang seharusnya ada dalam reformasi pasar, perlu dipahami pula bagaimana reformasi tersebut dilakukan. Pada beberapa kasus, reformasi dilakukan

secara spontan sehingga disebut sebagai *shock therapy*, sedangkan pada kasus-kasus lainnya reformasi dijalankan secara gradual dengan rancangan-rancangan tertentu. *Shock therapy* yang terjadi di Rusia dapat menjadi contoh reformasi pasar yang tidak berhasil. Hal ini disebabkan adanya intrik yang telah direncanakan para oligarki sehingga aset-aset negara justru dikuasai secara privat oleh *Siloviki*. Salah satu buktinya yaitu skandal perusahaan minyak Yukos yang terbongkar pada tahun 2000-an. Pemilik Yukos yaitu Mikhail Khodorkovsky akhirnya ditangkap dan dihukum atas dakwaan kepemilikan properti negara secara tidak wajar pada kurun waktu sekitar privatisasi pasca keruntuhan Uni Soviet (Jennings dalam Baltic Worlds 2012).

Berdasarkan pernyataan Jeffrey Sachs (2012), memang reformasi pasar di Rusia dijalankan sekadar untuk mengulang kesuksesan transformasi negara-negara Eropa Timur yang sudah terjadi. Transformasi yang berlangsung di tengah-tengah hiperinflasi, *mass shortage*, instabilitas politik, mata uang yang kolaps, dan ketakutan itu diharapkan menghasilkan perbaikan ekonomi secara cepat. Namun, dalam pelaksanaannya privatisasi tidak dilakukan secara transparan dan berdasar hukum sehingga memperluas peluang korupsi. Selain itu, ada pula tiga kekosongan yang belum diisi sehingga menyebabkan gagalnya reformasi pasar Rusia. Pertama, asistensi finansial dalam skala besar misalnya dari Barat. Kedua, kebijakan moneter dan fiskal untuk menghentikan inflasi, seperti pengurangan subsidi ke titik minimal dan penghapusan kontrol harga. Terakhir, jaring pengaman sosial yang bisa didapat sekaligus dari asistensi Barat guna menghindarkan masyarakat yang saat itu sudah miskin dari dampak-dampak ekonomi dan sosial berlebih (Sachs 2012).

Pada kasus Polandia, reformasi pasar melalui *shock therapy* merupakan hasil keputusan politik dalam negeri sehingga tekanan-tekanan eksternal tidak dirasakan. Sachs (2012) menyebutkan ada empat rekomendasi utama yang ia berikan sebagai penasihat Polandia yaitu liberalisasi harga, keterbukaan terhadap perdagangan, pembuatan hukum perdagangan berbasis pasar sesuai dengan hukum Eropa Barat, dan mobilisasi dukungan skala besar dari Barat. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pun berhasil diselenggarakan dengan dukungan dana stabilisasi Zloty dan pinjaman dari IMF, serta pembentukan *national investment*

funds (NIFs) guna mendukung privatisasi. Keberhasilan Polandia ditunjukkan dengan kurva U yang mengorelasikan cepat atau tidaknya reformasi (*reform speed*) dengan *output* (Mueller 2007). Pada awal mula reformasi pasar, terjadi krisis sebagai reaksi terhadap perubahan-perubahan spontan. Selanjutnya, peningkatan *output* berlangsung ketika stabilisasi telah berhasil. Titik terendah pada kurva U yang dialami setelah reformasi pasar Polandia setidaknya tidak separah kekacauan di Rusia sebab ada antisipasi kekacauan sosial seperti bantuan makanan darurat dari dana asistensi.

Dibandingkan dengan *shock therapy*, reformasi pasar yang tercatat dalam sejarah lebih banyak berhasil ketika gradualisme diterapkan. Untuk mencapai keberhasilan reformasi pasar, segala cara dapat dicoba termasuk melalui intervensi-intervensi. Namun, Sachs (dalam Easterly 2006) menekankan bahwa intervensi tersebut haruslah diaplikasikan secara sistematis, tekun, dan bersama-sama. Cara tersebut menjadi perlu mengingat reformasi pasar sebagai pendekatan eksperimental menuju perubahan sosial dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak terduga dari intervensi yang dilakukan negara. Oleh sebab itu, sebisa mungkin perubahan dilakukan dengan mengambil langkah kecil, observasi, dan kembali mengambil langkah kecil selanjutnya (Sachs dalam Easterly 2006). Contoh yang dapat diambil dari reformasi pasar secara gradual yaitu kasus Tiongkok. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemerintah Tiongkok memulai reformasi pasar secara bertahap sejak tahun 1978. Pembangunan ekonomi di zona-zona liberalisasi ekonomi yang dibangun pada 1980-an ditinjau ulang secara langsung oleh Deng Xiaoping pada tahun 1992. Setelah melihat perkembangan yang ada, pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan untuk menarik investasi asing agar masuk ke seluruh negeri (Motohashi 2015). Kebijakan ini menjadi akhir dari restriksi pemerintah yang melarang investasi asing di beberapa wilayah Tiongkok.

Titik Awal Reformasi Pasar India

Pada bulan Juli 1991, pemerintah India mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi baru (*new economic policies* / NEP) sebagai tanda diberlakukannya reformasi pasar yang sebenar-benarnya. NEP yang meliputi kebijakan mengenai liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi tersebut memiliki satu visi yang sama yaitu mengorientasikan sistem ekonomi India terhadap pasar dunia (Ishvarsinh 2014). Implikasi

dari kebijakan-kebijakan tersebut yaitu perubahan sistematis menuju ekonomi yang lebih terbuka dan bersandar pada mekanisme pasar. Hal ini disertai dengan perubahan pada peran sektor privat yang lebih besar, keterbukaan investasi asing, dan restrukturisasi peran pemerintah (India in Business 2016). Dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan dalam NEP tersebut berarti mengakhiri perdebatan tentang liberalisasi yang telah berlangsung sejak lama.

Meskipun perpolitikan di India sudah diwarnai perdebatan tentang liberalisasi sejak lama, namun perumusan NEP masih cukup mengejutkan bagi kelompok oposisi saat itu. Hal ini terutama mengingat bahwa hingga akhir jabatan Perdana Menteri Chandra Shekhar, ide mengenai perubahan paradigma ekonomi India menjadi neoliberalisme merupakan opsi yang dianggap tidak memungkinkan. India sempat mengalami krisis di tahun 1960-an (agrikultur) dan 1980-an, tetapi itu tidak menjadikan pemerintah berubah sepenuhnya dari kebijakan-kebijakan sosialis. Perdebatan yang ada antar faksi politik cenderung berkutat di dalam parlemen saja dan tidak cukup kuat untuk menyulut revolusi. Faksi-faksi itu sendiri yaitu negarawan orthodox yang pro-rezim berkuasa, liberalis selektif yang mengharapkan modifikasi pasar guna mendorong pertumbuhan, dan radikal pasar yang mendukung liberalisasi multi-arena (Sengupta 2008).

Perubahan-perubahan kecil sempat dilakukan oleh pemerintah India ketika terjadi kesulitan ekonomi. Misalnya saja pada tahun 1966, Perdana Menteri Indira Gandhi mengadvokasi liberalisme ekonomi di partai dan pemerintahan dalam kerangka *mixed economy*. Ketika krisis di bidang pertanian pun, Indira Gandhi memutuskan reformasi agrikultural berbasis inovasi teknologi dan insentif pasar (Sengupta 2008). Namun, tidak lama setelah itu, justru terjadi titik balik yang radikal dengan adanya pengetatan kontrol impor, legislasi anti-monopoli, dan beragam nasionalisasi (Sengupta 2008). Perubahan menuju arah liberal terjadi kembali di tahun 1981 ketika India membuka diri untuk menerima bantuan IMF setelah mengalami krisis. Negosiasi bantuan antara IMF dengan India terus berlangsung hingga di awal tahun 1990 ketika krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak 1980-an semakin parah. Krisis tersebut menyebabkan devaluasi, neraca pembayaran yang kritis, serta situasi politik yang kacau. Dengan demikian, ada asumsi bahwa NEP yang

dikeluarkan Perdana Menteri Narashima Rao terkait dengan krisis tersebut dan bantuan dari IMF diibaratkan sebagai paket *structural adjustment*.

Untuk memahami reformasi pasar yang terjadi di India, terdapat satu hal utama yang harus diketahui yaitu titik awal yang sebenarnya bukan dimulai pada tahun 1991 ketika NEP dirilis. Tahap-tahap reformasi pasar India sudah dimulai setidaknya sejak dua dekade sebelum NEP ada dan tahap-tahap itu bukanlah perubahan-perubahan kecil seperti yang sebelumnya penulis maksud sebagai upaya liberalisasi. Tahap-tahap ini lebih berupa langkah persiapan yang dilakukan pemerintah sebelum mampu bersaing dalam pasar global. Dengan model seperti itu, reformasi pasar yang kemudian terjadi cenderung sesuai dengan pandangan gradualisme dibandingkan *shock therapy* (India in Business 2016). Bahkan, dapat dikatakan bahwa reformasi pasar India bersifat evolusioner sebab melalui proses panjang dan dimulai dengan persiapan elemen-elemen terkecil yang dibutuhkan dalam kompetisi pasar.

Jika ditarik ke belakang, India di masa setelah kemerdekaan jauh lebih tertutup dibandingkan dengan sekarang. Karena efek trauma dari kolonialisme maka pemerintah India saat itu menerapkan kebijakan ekonomi yang mengutamakan swadaya (*self-reliance*). Pada industri domestik, proteksionisme diberlakukan secara ketat sehingga perusahaan asing harus mempertimbangkan risiko investasi yang besar. Proteksionisme itu terangkum dalam kerangka ekonomi terencana yang diimplementasikan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru tahun 1940-an dengan referensi dari Uni Soviet (Motohashi 2015). Ekonomi terencana tersebut meliputi regulasi-regulasi tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi, baik untuk transaksi asing ataupun domestik. Salah satu regulasi yang populer yaitu License Raj (License Permit Quota Raj) untuk mengatur pendirian dan pengoperasian bisnis melalui pemberian "*red tape*". Secara harfiah regulasi tersebut diambil dari kata "*license*" yang berarti surat izin dan "*raj*" yang berarti aturan atau kekuasaan. Di balik itu, License Raj menjadi frasa bernada sinis sebagai ungkapan paska kolonisasi bahwa masyarakat India lebih baik diatur oleh surat izin daripada Inggris. License Raj ini menjadi indikasi adanya restriksi atas sektor privat domestik ataupun asing, kontrol negara terhadap perbankan dan asuransi, monopoli sektor publik, dan restriksi berupa hambatan tarif dan non-tarif dalam impor (Kotwal et al 2011).

Memasuki tahun 1980-an pada masa pemerintahan Indira Gandhi, deregulasi dimulai walaupun pasar masih tertutup dan regulasi perdagangan juga masih ketat (Motohashi 2015). Hambatan tarif dan kuota pun tetap dipertahankan dalam aturan mengenai impor di India. Namun, India menjadi sedikit lebih terbuka karena barang-barang kapital, bahan mentah, dan setengah jadi sudah boleh diimpor. Hanya saja barang-barang konsumsi masih dilarang untuk diimpor, sedangkan barang-barang yang sebetulnya bisa diproduksi di dalam negeri boleh diimpor dengan lisensi khusus. Deregulasi ini awalnya diterapkan pada sektor otomotif dan elektronik sehingga tercipta *joint venture* antara Suzuki dengan Maruti Udyog Limited. Akan tetapi, liberalisasi belum sepenuhnya terjadi sebab tidak ada perusahaan asing lain yang boleh masuk selain Suzuki.

Setelah NEP diberlakukan, barulah India meningkatkan sistem perdagangannya untuk menciptakan liberalisasi perdagangan. Caranya yaitu dengan menghapuskan lisensi impor, mengurangi hambatan tarif, dan mengotorisasi investasi asing. Selain itu, investor asing diizinkan untuk memperjualbelikan saham perusahaan publik (Motohashi 2015) sehingga perusahaan-perusahaan otomotif seperti Daimler Chrysler, GM, dan Ford aktif memasuki pasar India. Hingga pada tahun 1993, transisi terjadi pula dalam *exchange rates system* yang awalnya berpatok pada mata uang rekan bisnis India menjadi bergantung pada pasar (Kotwal et al 2011).

Meskipun mendapat dorongan *structural adjustment* dari IMF antara dasawarsa 1980 dekade 1990-an, India tidak benar-benar memulai reformasi pasar pada 1991. Kotwal et al (2011) memaparkan bahwa peristiwa transisi ekonomi India berkebetulan dengan ketersediaan teknologi baru yang sedang berkembang. Teknologi baru tersebut merupakan hasil yang didapat dari transfer teknologi dari barang-barang impor. Selain itu, reformasi pasar India dilatarbelakangi dengan berakhirnya monopoli oleh pemerintah, kemajuan di kompetisi sektor komunikasi, dan tindakan-tindakan pemerintah pra-reformasi. Tindakan-tindakan pra-reformasi sendiri misalnya saja substitusi impor, kebijakan wajib belajar hingga perguruan tinggi, dan ekspansi jaringan perbankan yang dimulai tahun 1980-an.

Model Non-Ideal Reformasi Pasar India dan Kontrol Ketidaktepatan Pasar

Dengan bantuan yang diterima ketika krisis, India sedikit banyak mendapat pengaruh dari IMF dalam pelaksanaan reformasi pasar. Dengan kata lain, terdapat dorongan eksternal yang menyebabkan India melakukan transisi dari ekonomi terpusat menjadi ekonomi pasar. Akan tetapi, harus ditekankan bahwa dorongan eksternal terutama yang bersifat koersif cenderung tidak meraih *outcome* ideal seperti yang diharapkan. Penelitian Henisz et al (2005) menghasilkan temuan bahwa hanya sedikit di antara 71 negara yang mereformasi bidang telekomunikasi dan listrik dalam kurun waktu 1977 sampai 1999 dengan menerapkan keseluruhan empat elemen ideal. Sisanya rata-rata hanya menerapkan satu sampai tiga elemen ideal seperti kombinasi antara privatisasi dan pemisahan regulatori. Sedangkan, elemen liberalisasi dan depolitisasi lebih sedikit diaplikasikan atau diaplikasikan pada level minimum meskipun suatu negara telah melakukan reformasi pasar.

Tidak setiap reformasi pasar selalu disertai dengan semua elemen yang disebutkan Henisz et al berupa privatisasi, pemisahan regulatori, depolitisasi, dan liberalisasi. Justru menurut Kotwal et al (2011), penghapusan regulasi-regulasi proteksionis akan membebaskan pihak yang mempunyai akses terhadap faktor-faktor yang diperlukan setelah reformasi, tetapi tidak bagi pihak yang nihil akses. Jika demikian maka hanya orang-orang yang sudah punya modal yang mampu berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi paska reformasi. Persaingan yang terjadi kemudian akan tidak sehat karena pasar sempurna diasumsikan sebagai kondisi yang disertai dengan informasi gratis dan simetris bagi semua orang (Wunner 2000). Oleh sebab itu, liberalisasi tidak mutlak diperlukan oleh negara yang tingkat ketidaksetaraannya tinggi. Ketika terdapat pihak-pihak yang unggul dalam informasi maka itu dapat dimanfaatkan untuk menekan menggunakan kekuatan pasar.

Di sisi lain, reformasi pasar sebagai bentuk transisi ekonomi merupakan tindakan yang tidak terlepas dari proses politisasi atau *highly politicized* (Wunner 2000). Keberadaan hambatan-hambatan yang harus dipertimbangkan oleh negara memunculkan "*second-best theory*" yang berupa model lebih realistis dari model ideal Henisz et al. Hasilnya yaitu sistem ekonomi campuran (*mixed economic systems*) yang mengombinasikan *market forces* dengan intervensi aktif pemerintah

(Wunner 2000). Namun, karena belum ada model yang meyakinkan sebagai perwujudan atas model realistik tersebut maka opsi untuk menghadapi hambatan dalam reformasi pasar kembali lagi kepada negara. Pemerintah bisa memilih untuk menggunakan kebijakan ekonomi secara optimal dalam menangani ketidaksempurnaan pasar.

Dilema yang dihadapi India sama persis seperti yang disampaikan oleh Kotwal et al dan Wunner terutama terkait ketidaksempurnaan pasar. Pemerintah India pun memilih menghadapi hambatan-hambatan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung ekonomi pasar tanpa merugikan sektor dalam negeri. Dengan mengontrol ketidaksempurnaan pasar, India berhasil melakukan reformasi pasar meskipun bukan dalam model yang ideal. Ada tiga hal yang menunjukkan keberhasilan tersebut yaitu: (1) keuntungan dari tindakan pra-reformasi; (2) pelaksanaan reformasi pasar yang tidak sepenuhnya akibat dorongan eksternal; (3) liberalisasi dan depolitisasi yang tidak dijadikan *outcome* reformasi pasar. Keuntungan dari tindakan pra-reformasi yaitu berupa *skilled labor* akibat kebijakan substitusi impor, transfer teknologi dari perusahaan asing akibat impor dan regulasi moda masuk *joint venture*, serta tingkat pendidikan pekerja yang tinggi karena kebijakan wajib belajar hingga perguruan tinggi. Sedangkan, pelaksanaan reformasi pasar India sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya melalui pendekatan gradualisme. Dengan tekanan yang minim dari pihak eksternal maka *outcome* ideal yang seharusnya ada dalam reformasi pasar bisa dikesampingkan oleh India.

India sebagai negara yang telah melalui reformasi pasar belum dapat dikatakan liberal dalam segala aspek. India bersama dengan Brazil menjadi negara BRICs yang sama-sama merupakan "*reluctant globalizer*" karena rendahnya level paparan terhadap globalisasi (Beausang 2012). Bahkan, India memiliki pakem yang paling erat di antara negara-negara BRICs dalam menentukan bagaimana negara tersebut harus membuka diri dan seberapa lebar. Namun, bukan berarti bahwa reformasi pasar yang dilakukan India tidak berhasil karena liberalisasi tidak dilakukan secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi pasca reformasi pasar India signifikan sehingga menjadikannya masuk ke kelompok negara berkembang yang tumbuh pesat yaitu BRICs. Angka rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) India tahun 1989-1990 berada pada 5,8% dan mencapai 6% pada kurun waktu 1990-2000, serta 6,9% pada 2000-2005. Sementara itu, pertumbuhan PDB pada tahun 2010 tembus hingga dua digit yaitu 10,4% (UNCTAD dalam Beausang

2012). Pertumbuhan PDB di tahun 2015 turun dari tahun 2010, namun naik dari tahun 2014 menjadi 7,3% (Bank Dunia 2016a).

Akan tidak adil rasanya jika melihat pertumbuhan ekonomi India dari PDB saja karena pengentasan kemiskinan juga merupakan indikator dari kesuksesan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan di India semakin berkurang dari 45,3% di tahun 1993 menjadi 21,9% di tahun 2011 (Bank Dunia 2016). Hal ini berkat kebijakan pemerintah India dalam menggabungkan aspek inovasi dengan masyarakat miskin. Tentu saja pemerintah melakukan intervensi melalui bantuan dana (*grants*) untuk membiayai *pro-poor innovation* dan insentif penghargaan. Selain itu, pemerintah menjembatani institusi *research & development* (R&D) dengan industri, universitas, organisasi non-pemerintahan, dan jaringan pengentas kemiskinan (Beausang 2012). Bentuk *pro-poor innovation* yang sudah ada misalnya saja n-Logue yang dikembangkan di Chennai's Institute of Technology berupa layanan internet untuk daerah rural. Ada pula Baluchari yaitu program desain kain sari yang memungkinkan ekspansi pasar kain sari berharga mahal buatan rumah tangga sehingga menjadikannya lebih murah (Utz dan Dahlman dalam Beausang 2012).

Simpulan

Dari pertumbuhan ekonomi yang dialami India selama beberapa dekade terakhir, dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah masih menjadi faktor yang mampu mengurangi hambatan-hambatan yang ada. Hambatan tersebut salah satunya adalah ketidaksempurnaan pasar yang dihadapi India setelah melaksanakan reformasi pasar secara gradual. Meskipun terdapat *outcome-outcome* ideal yang seharusnya menyertai reformasi pasar, ternyata idealisme tersebut tidak berlaku pada kasus India. Pada reformasi pasar di India secara jelas dapat diketahui bahwa terdapat privatisasi dan pemisahan regulatori. Akan tetapi, liberalisasi belum menjadi urgensi bagi negara ini. Selain itu, depolitisasi juga terklesan tidak realistis sebab politisasi merupakan hal yang tidak dipisahkan dalam ekonomi suatu negara. Bahkan, keputusan untuk melaksanakan reformasi pasar itu sendiri dapat dikatakan sebagai proses politisasi. Dengan demikian, India akan tetap terus berkembang dengan reformasi pasar dalam model yang non-ideal.

Daftar Pustaka

- Baltic Worlds, 2012. "Baltic Worlds Annual Round Table Russian Market Reforms. Lack of Trust and Institutions" [online] <http://balticworlds.com/russian-market-reforms/> [diakses 7 Januari 2015].
- Bank Dunia, 2016a. "GDP Growth (Annual %)" [online] dalam <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG> [diakses 7 Januari 2015].
- Bank Dunia, 2016b. "India" [online] <http://data.worldbank.org/country/india> [diakses 7 Januari 2015].
- Beausang, Francesca, 2012. *Globalization and the BRICs: Why the BRICs Will Not Rule the World for Long*. Palgrave Macmillan.
- Easterly, William, 2006. "The Big Push Déjà Vu: A Review of Jeffrey Sachs's 'The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time'", *Journal of Economic Literature*, 44 (1), pp. 96-105.
- Henisz, Witold J., Bennet A. Zelner, dan Mauro F. Guillén, 2005. "The Worldwide Diffusion of Market-Oriented Infrastructure Reform, 1977-1999", *American Sociological Review*, 70 (6), pp. 871-897.
- India in Business, 2016. "India's Economic Reforms" [online] dalam <http://indiainbusiness.nic.in/newdesign/index.php?> [diakses 7 Januari 2015].
- Ishvarsinh, Vaghela Dharini. 2014. "New Economic Policies: Liberalization, Privatization, Globalization", *Journal of Social Sciences*, 2 (5). Knowledge Consortium of Gujarat.
- Kotwal, Ashok, Bharat Ramaswami, dan Wilima Wadhwa, 2011. "Economic Liberalization and Indian Economic Growth: What's the Evidence?", *Journal of Economic Literature*, 49 (4), pp. 1152-1199.
- Motohashi, Kazuyuki, 2015. *Global Business Strategy Multinational Corporations Venturing into Emerging Markets*. Springer Texts in Business and Economics

- Mueller, Hannes, 2007. "Why Russia Failed to Follow Poland: Lessons for Economists" [online] dalam http://www.politik-salon.de/files/hm_receo_2007.pdf [diakses 7 Januari 2015].
- Sachs, Jeffrey, 2012. "What I Did in Russia" [online] dalam <http://jeffsachs.org/2012/03/what-i-did-in-russia/> [diakses 7 Januari 2015].
- Sengupta, Mitu, 2008. "How the State Changed Its Mind: Power, Politics and the Origins of India's Market Reforms", *Economic and Political Weekly*, 43 (21), pp. 35-42.
- Social Research, 76 (1), Russia Today (SPRING 2009), pp. 1-28.
- Susanto, Joko, 2015. "Market Reform", *Geopolitik Kekuatan Ekonomi Baru*. 30 September. Surabaya: Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga.
- United Nations Conference on Trade and Development, 2013. "World Investment Report 2015: Annex Tables " [online] <http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx> [diakses 7 Januari 2015].
- Wunner, N., 2000. "Chapter 4 Economic Theory and Transition", dalam *The Political Economy of Transition*. Weisbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH.

